

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020).

Arief Budiman, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*, (Bandung: Penerbit ITB, 2010).

Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filasat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).

Aziz Syamsudi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, (Yogyakarta: Andi, 2020).

Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Press, 2018).

Fakhry Amin, et.al, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023)

George Pavlakos, *Law, Rights and Discourse: The Legal Philosophy of Robert Alexy*, (London: Bloomsbury Publishing, 2007).

H.S Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 49

Jimly Asshiddique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan*

Pemikiran Hukum Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Jimly Asshiddique, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009)

Lukman Santoso Az dan Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016).

Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hal. 6

M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980).

Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024).

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalm Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hal. 1-2

Robert Alexy, *A Theory of Legal Argumentation*, (London: Clarendon, 1989).

Robert E. Scott dan Jody S. Kraus, *Contract Law and Theory*, (Massachusetts: LexisNexis 2013).

Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014).

Siti Ummu Adilah, *Hukum Kontrak*, (Semarang: Unissula Press, 2010).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 1987)

Suharsimi Ari Kunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1993, cet. Ke-2).

Sukendar, Aris Prio Agus Santoso, NS. Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum Suatu*

Pengantar, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2024).

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembar Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembar Negara Republik Indonesia, No. 29, 2025, Tambahan Lembar Negara No. 7100)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia No. 147, 2020, Tambahan Lembar Negara No. 6525).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara No. 4, 2009, Tambahan Lembar Negara No. 4959).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara No. 106, 2007, Tambahan Lembar Negara No. 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia No. 82, 2011, Tambahan Lembar Negara No. 5234).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblaad* No. 23 Tahun 1847)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 208, 2021, Tambahan lembaran Negara No. 6721)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara No. 89, 2024, Tambahan Lembaran Negara No. 6921).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia No. 1079, 2017).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara *jo.* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia No. 220, 2020).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran

Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia No. 470, 2021).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia Nomor 78.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perizinan Serta Pencatatan Perubahan Pemegang Saham, Direksi, dan/atau Komisaris Atas Izin Usaha Pertambangan Yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/Walikota Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Jurnal:

Arif Firmansyah, “Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi Vol.17 No.3, 2020. DOI:10.31078/jk1732.

Elida Mabun, Ramlani Lina Sinaulan, Yurisa Martanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia”, *Journal of Legal Research* Vol. 4 No. 4, 2022, DOI:10.15408/jlr.v4i4.28223.

H.Z. Ogneviuk, "Antropological Approaches In Legal Certainty Research",
Antropological Measurements of Philosophical Research, No. 14, 2018,
doi: 10.15802/ampr.v0i14.150573 hal. 63

Hartana, "Pelaksanaan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Batubara Dalam
Pelaksanaan Ekspansi Perusahaan Group", Jurnal Komunikasi Hukum
Vol. 3, No. 2, 2017, DOI:<https://doi.org/10.23887/jkh.v3i2.11820>

Nefi, et.al., "Implikasi Keberlakuan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Pasca
Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan
Batubara," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 48: No. 1, Article 7. DOI:
10.21143/jhp.vol.48.no.1.1604.

Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan
Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012", Jurnal Yudisial Vol.7
No.3, 2014. DOI:10.29123/jy.v7i3.73.

Paulus Wisnu Yudhoprakoso dan Yanti Fristikawati, "Peran Pemerintah Daerah
Dalam Penambangan Nikel (Masalah Perizinan dan Pelindungan
Lingkungan)", Jurnal Gloria Justitia, Vol. 4, No.2, April 2024.
[DOI:10.25170/gloriajustitia.v4i2.6440](https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v4i2.6440).

Victor Imanuel Williamson Nalle, Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan
Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba, Jurnal Konstitusi,
Volume 9, Nomor 3.

Yusuf A. & Priyanto R, "Aspek hukum dalam Akuisisi Perusahaan Tambang di
Indonesia", Jurnal Hukum Pertambangan Volume 12 Nomor 4.

Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi), Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 6, No. 2, 2003.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, <https://kbbi.web.id/perjanjian>

Website:

<https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/582?jp=1> diakses pada hari
Senin, 17 Maret 2025 pukul 15.38 WIB

[https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/#:~:text=Peraturan%20Pelaksanaan%20yang%20dimaksud%20disini,melibatkan%20lembaga%20legislatif%20\(DPR\).](https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/#:~:text=Peraturan%20Pelaksanaan%20yang%20dimaksud%20disini,melibatkan%20lembaga%20legislatif%20(DPR).) Diakses pada
hari Rabu, 02 April 2025.

Frequently Asked Questions,

https://www.minerba.esdm.go.id/upload/file_menu/20230609113039.pdf

diakses pada Tanggal 27 Mei 2025.

https://www.gramedia.com/literasi/pengertianakuisisi/?srsltid=AfmBOorTV8CymV9DuT4oZaERHtmUoB-9tfuQZZF_HJF44ENnynPEGMh diakses pada

hari Minggu, 28 April 2025.

KBLI & Jenis Izin Minerba, <https://www.minerba.esdm.go.id/pdf/169-KBLI%20dan%20Jenis%20izin>, diakses pada tanggal 29 Mei 2025

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020,

<https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>, diakses pada tanggal 29

Mei 2025.

Hasil Penelitian:

Julianus Marcos Dhae Ndoy, “Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha
Pertambangan Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang”, (Surabaya: Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2024).

Putusan:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 413/G/2023/PTUN.Jkt.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor
1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Nomor 65/Pdt.Sus-
PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Putusan Pengakhiran Kepailitan Nomor
65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst. hal. 3

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 413/G/2023/PTUN.Jkt,

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor
413/G/2023/PTUN.Jkt. hal.

Putusan Pengakhiran Kepailitan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Nomor 65/Pdt.sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst

Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Permohonan Menjual Nomor

65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst.

Lain-lain:

Hasil Wawancara dengan Kansha Nabila, *Legal Counsel* PT Anzawara Satria,

wawancara dilakukan secara daring via Zoom, Jakarta 30 Mei 2025

Hasil Wawancara dengan Nardo Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara,

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dilakukan secara daring via

Zoom, Jakarta, 28 Mei 2025

Mahkamah Konstitusi, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, (Jakarta: Sekjen dan

Kepaniteraan MK, 2008),

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Program

Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Dan Magister Kenotariatan

Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: FH UPH, 2023).